



Pemkot Susun Raperda Kebakaran

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Kota Yogyakarta yang hanya seluas 32 kilometer persegi dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki risiko musibah kebakaran yang cukup tinggi. Sementara selama ini, penanganan musibah tersebut hanya diserahkan pada satu instansi penyelesaiannya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal ancaman bahaya kebakaran ini semakin besar memasuki

musim kemarau tahun ini.

Karenanya, BPBD Kota Yogyakarta, pada tahun ini akan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kebakaran. Melalui raperda tersebut akan diatur mengenai kewenangan berbagai pihak dalam menangani dan mengantisipasi kebakaran agar lebih optimal.

Kepala BPBD Kota Yogyakarta Agus Winarto menilai, meski aspek fungsi pemadaman selama ini tidak disertai peraturan daerah, sebenarnya tidak pernah memuncu-

kan masalah. Namun melihat persoalan kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta ke depan yang akan makin krusial, maka diperlukan perda yang mengatur masalah tersebut. Hal ini mengingat wilayah permukiman menjadi makin padat, gedung-gedung fasilitas publik semakin banyak, serta banyaknya kunjungan wisatawan.

"Jadi saya kira perlu antisipasi terhadap ancaman itu. Ke depan, untuk aspek-aspek represif khususnya fungsi antisipatif akan kurang optimal jika tidak ada perda," kata

Agus, Rabu (7/5).

Rencananya raperda kebakaran akan mengatur aspek kelembagaan, peran masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, juga berisi tentang ketentuan standar operasional prosedur (SOP), retribusi, manajemen kebakaran ada permukiman, penguatan kapasitas dan kewenangan kelembagaan unit pemadam kebakaran akan ditingkatkan.

"Salah satu bentuk represif dengan penerapan raperda adalah kewajiban pihak swasta pemilik gedung besar-besar

untuk menerapkan SOP antisipasi kebakaran," katanya.

Saat ini pihaknya tengah menyusun bahan Raperda kebakaran. Dalam rencana umum pengadaan 2014, sudah dialokasikan anggaran Rp 300 juta untuk jasa konsultasi penyusunan Raperda Kebakaran. Ditambahkan, perda itu akan diturunkan dengan aturan-aturan sebagai petunjuk teknis. "Kalau memungkinkan kita masukkan tahun ini draf raperda-nya. Kalau tidak bisa tahun depan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris

Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwanto, siap membahas raperda tersebut bisa memang dibutuhkan masyarakat. Terutama dalam antisipasi kebakaran. Namun pihaknya masih menunggu anggota DPRD yang baru, karena tahun ini akan berlangsung pergantian anggota dewan baru pada 12 Agustus.

"Harus nunggu anggota DPRD yang baru. Kami tunggu draftnya dulu. Pada prinsipnya yang menguntungkan masyarakat akan kami mendukung. Kalau merugikan tentu tidak," katanya. ■ **ed:** eko widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005